



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ALWIATI A.
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 153329

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 236.948.000

1. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 51.300.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 65.048.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 120.600.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 245.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 1S7 JUPITER-MX Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU F651RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU SIGRAV1.0 D MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 2.200.000

**D. SURAT BERTAGIH** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.410.750

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 496.558.750

**III. HUTANG** Rp. 131.814.212

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 364.744.538



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.